

EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS KOMUNITAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sri Wahyuningsih^{1*}, Joyce Angela Yunica²

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Pembina Palembang^{1,2}

*Corresponding Author : wahyuningsihs82@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Mura Tara, Sumatera Selatan, karena daerah ini memiliki angka stunting yang signifikan di wilayah tersebut dan Kabupaten Mura Tara termasuk pada pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang terkait dengan kebijakan penanggulangan stunting pada balita di Kabupaten Mura Tara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran evaluasi kebijakan yang lebih jelas tentang upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Mura Tara dan implikasinya bagi kebijakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini melakukan evaluasi berdasarkan lima aspek utama: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya serius dalam implementasi kebijakan, target penurunan stunting belum tercapai sepenuhnya. Komunikasi antara petugas dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Akses layanan kesehatan juga belum merata. Meskipun kebijakan telah membentuk kerangka kerja yang jelas, masyarakat masih kurang mendapatkan informasi tentang program yang ada. Asumsi dasar kebijakan cukup kuat dan dampak positif mulai terlihat, namun masih ada tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi petugas. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan penurunan stunting secara efektif.

Kata kunci : evaluasi, kebijakan, penurunan, percepatan, stunting

ABSTRACT

Stunting is a serious health challenge in Indonesia that requires intensive attention. According to the World Health Organization (WHO), Indonesia ranks third in Southeast Asia with the highest prevalence of stunting. Data shows that approximately 29.5% of babies are born prematurely and 6.2% with low birth weight, potentially experiencing growth and cognitive development disorders, and even increasing the risk of death. The 2024 Indonesian Health Survey reported a stunting rate of 33.1% in Musi Rawas Utara Regency, an increase of 12.9% from the previous year (20.2% in 2023). To address this challenge, the Indonesian government is working hard to reduce stunting rates, particularly through policies targeted at the district/city level. This phenomenological study uses a qualitative approach to explain the nature of the phenomenon and provide an overview of the actual situation. The study focuses on Musi Rawas Utara Regency, South Sumatra, due to its significant stunting rates and implementation of policies to accelerate stunting reduction according to Presidential Regulation Number 72 of 2021. The study evaluates the policy based on five main aspects: effectiveness, sufficiency, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that despite serious efforts in policy implementation, the target of reducing stunting has not been fully achieved. Communication between officers and the community still needs improvement, and there are limitations in human resources and budget. Access to healthcare services is also not evenly distributed. Although the policy has formed a clear framework, the community still lacks information about existing programs.

Keywords : evaluation, policy, acceleration, reduction, stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting di

Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 27,6% pada tahun 2020 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya asupan gizi, infeksi, dan kurangnya perawatan kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting. Stunting menjadi salah satu tantangan kesehatan serius di Indonesia yang memerlukan perhatian intensif. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia berada di peringkat ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa sekitar 29,5% bayi lahir prematur dan 6,2% dengan berat badan rendah, yang berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan kognitif bahkan meningkatkan risiko kematian (Gunardi, 2021).

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia berupaya keras menurunkan angka stunting, terutama dengan kebijakan yang ditargetkan pada tingkat kabupaten/kota. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi masalah stunting, seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting). Program-program ini mencakup edukasi gizi seimbang, promosi pemberian ASI eksklusif, dan penyediaan akses terhadap layanan kesehatan serta sanitasi yang memadai. Masalah stunting pada anak balita tetap menjadi isu penting dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Prevalensi Stunting tertinggi berada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 33,1 %. Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia Angka stunting di Kabupaten Muratara naik 12,9 persen, tahun 2023 kasus stunting di Kabupaten Muratara hanya 20,2 persen, sedangkan di tahun 2024 ini kasus stunting di Kabupaten Muratara berdasarkan Survei 33,1 persen. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa permasalahan Stunting pada Balita masih menjadi masalah yang harus di selesaikan agar kasus stunting bertahap turun dan menjadi tidak ada kasus balita dengan stunting.

Stunting pada anak balita merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kemiskinan, gizi, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan. Menurut beberapa penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi pada stunting, yaitu kemiskinan, faktor sosial dan budaya, peningkatan risiko penyakit infeksi, kerawanan pangan, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terbatas (Aridiyah et al., 2015). Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi stunting meliputi pengetahuan masyarakat tentang stunting, pola asuh anak, serta kebiasaan dan perilaku pemberian makanan pada balita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stunting dapat disebabkan oleh faktor langsung seperti kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi, serta faktor tidak langsung seperti kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, pola asuh yang tidak tepat, sanitasi yang buruk, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terbatas (Mitra, 2015). Penelitian lain di Kota Palembang menemukan bahwa beberapa faktor yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada Balita yaitu ukuran panjang badan saat lahir, riwayat pemberian ASI eksklusif, kondisi ekonomi rumah tangga, pendidikan Ibu, serta pengetahuan tentang gizi ibu terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting (wahyuningsih et al., 2024).

Hambatan dalam pencegahan dan penanganan stunting seringkali terkait dengan faktor sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan budaya lokal, kebiasaan masyarakat, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang untuk anak balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial budaya, potensi lokal, serta merumuskan strategi kebijakan untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Mura Tara. Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini akan membahas berbagai aspek yang mempengaruhi stunting dan upaya penanggulangannya. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya adaptif dan ideasional berperan penting dalam kejadian stunting. Budaya adaptif seperti pola hidup sibuk

dan ibu bekerja dapat mempengaruhi kualitas asuh anak, sedangkan budaya ideasional seperti kepercayaan dan pernikahan dini juga berdampak signifikan terhadap stunting. Oleh karena itu, memahami peran budaya dalam pencegahan stunting sangatlah penting untuk mengembangkan program-program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan program pencegahan stunting yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan sosial budaya dan potensi lokal, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Mura Tara dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Evaluasi kebijakan pencegahan stunting berbasis komunitas sangat penting untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mura Tara. Dengan melakukan evaluasi, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan program tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas program (WHO, 2018). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas program pencegahan stunting di Kabupaten Mura Tara karena berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia 2024 angka kejadian Stunting di Kabupaten Mura Tara yaitu 33,1 % meningkat 12,9 % dari tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu 20,2%.

Berdasarkan latar belakang tersebut Kabupaten Mura Tara menjadi Kabupaten dengan Jumlah kasus Stunting terbanyak di Sumatera Selatan. Menghadapi masalah stunting di Kabupaten Muratara memerlukan upaya kolektif dan terintegrasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan masyarakat, organisasi, dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran evaluasi kebijakan yang lebih jelas tentang upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Mura Tara dan implikasinya bagi kebijakan kesehatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini adalah fenomenologi menggunakan pendekatan kualitatif Fenomenologi menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi juga diartikan sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Mura Tara, Sumatera Selatan, karena daerah ini memiliki angka stunting yang signifikan di wilayah tersebut dan Kabupaten Mura Tara termasuk pada pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang terkait dengan kebijakan penanggulangan stunting pada balita di Kabupaten Mura Tara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis data interaktif (Miles dan Saldana 2014:14). Penelitian ini dilaksanakan Maret Hingga April 2025. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran evaluasi kebijakan yang lebih jelas tentang upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Mura Tara dan implikasinya bagi kebijakan kesehatan masyarakat.

HASIL

Evaluasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (Dalam Subarsono 2011). Analisis ini menggunakan lima kriteria keberhasilan evaluasi

kebijakan publik, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menilai sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Kecukupan menilai seberapa jauh capaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah stunting. Pemerataan mengukur distribusi manfaat kebijakan di seluruh Kabupaten Mura Tara. Responsivitas mengevaluasi kepuasan dan respon masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Ketepatan menganalisis nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan dengan menggunakan lima kriteria yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Hasil yang di peroleh dapat dinilai dan dengan kriteria berikut:

Efektivitas

Konsep efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu, baik dari segi hasil maupun proses. Berdasarkan penelitian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Mura Tara, peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dalam implementasinya, Pemerintah di Kabupaten Mura Tara melibatkan beberapa organisasi dan instansi, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Mura Tara dan Puskesmas dengan angka kejadian kasus Stunting tertinggi di Kabupaten Mura Tara yaitu di Puskesmas Nibung. Selain itu juga bekerja sama dengan Posyandu untuk melakukan pemantauan dan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan dan kerja sama antar instansi ini, diharapkan program penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya efektif. Meskipun target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 telah ditetapkan, namun angka stunting di Kabupaten Mura Tara tahun 2024 masih tinggi yaitu meningkat menjadi 33,1%, bahkan meningkat 12,9% dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan antara lain adalah kurangnya komunikasi efektif antara petugas dengan masyarakat. Meskipun telah dilakukan penyuluhan dan edukasi tentang gizi dan pola makan seimbang, pemahaman masyarakat tentang penyebab stunting masih terbatas, sehingga partisipasi masyarakat dalam sosialisasi juga rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting.

Kecukupan

Kriteria kecukupan dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan kebijakan dan kecukupan kespesertaan dari masyarakat. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara dan kepesertaan masyarakat dalam mengikuti program –

program yang di buat oleh yang berwenang dalam upaya menurunkan angkakejadian stunting. Ketersediaan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga terampil dan fasilitas yang mendukung, sangat penting untuk menentukan efektivitas kebijakan penurunan stunting. Dengan demikian, kecukupan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan kepesertaan masyarakat mengikuti program – program penurunan angka kejadian stunting seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, sanitasi air bersih dan penguatan posyandu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kecukupan tenaga giizi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara. Ahli gizi di tugaskan untuk menangani banyaknya balita stunting, sehingga dapat membantu menurunkan angka kejadian stunting. Namun ketercukupan tenaga juga harus di imbangi dengan ketercukupan kepesertaan masyarakat dalam mengikuti program – program pemerintah terkait penurunan stunting seperti kehadiran mengikuti edukasi gizi dan juga rutin mengikuti posyandu untuk membantu memantau tumbuh kembang balita jika tercatat stunting sehingga dapat segera memperoleh penanganan, dan penguatan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting yang efektif.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik merujuk pada prinsip keadilan dalam distribusi manfaat dan layanan kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks penurunan stunting, pemerataan berarti bahwa semua kelompok masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis, status ekonomi, atau latar belakang sosial, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan program-program terkait stunting hal ini di maksudkan agar tidak terjadi pertambahan jumlah kasus stunting dan terjadi penurunan dilakukan tidak hanya pengobatan tetapi dari pencegahan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mencakup berbagai intervensi, seperti pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan, imunisasi, promosi menyusui, dan kelas ibu hamil dan balita, untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Tabel 1. di Kabupaten Mura Tara Tahun 2024

No	Jenis Suplemen	Sasaran	Target	Capaian
1	Tablet Fe	Ibu Hamil	50%	46%
2	Tablet Fe	Remaja Puteri	50%	31%

Data menunjukkan bahwa jumlah penerima Tablet Tambah Darah (TTD) di Kabupaten Mura Tara belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, capaian ibu hamil yang mendapat Tablet Fe yaitu 46% sementara target yang harus d capai adalah 50%, sementara capaian remaja puteri yang mendapat tablet Fe yaitu 31 % sedangkan target adalah 50% . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mura Tara, khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas, telah berupaya mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting, tetapi masih perlu perbaikan dalam hal pemerataan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh Puskesmas dan klinik kehamilan yang ada di kabupaten ini. Selain itu, Program Makanan Bergizi untuk Anak (PMBA) dilaksanakan bersamaan dengan imunisasi, yang meliputi pemberian sayuran dan buah-buahan bernutrisi seperti wortel, bayam, brokoli, pisang, dan apel, serta sumber protein seimbang seperti telur rebus dan kacang-kacangan.

Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan merespons kebutuhan masyarakat. Menurut William N Dunn, responsivitas kebijakan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah membentuk kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi stunting di Kabupaten Mura Tara. Peraturan ini mendorong pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat terkait kesehatan dan gizi, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting untuk melaksanakan program-program yang sesuai. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki komitmen tinggi, komunikasi antara petugas dan masyarakat masih belum optimal. Banyak masyarakat yang merasa kurang mendapat informasi yang memadai tentang program-program yang ada, sehingga mereka kurang memahami pentingnya partisipasinya dalam upaya penurunan stunting. Selain itu, kurangnya insentif bagi petugas juga dapat mempengaruhi motivasi mereka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperbaiki komunikasi dan interaksi antara petugas dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Ketepatan

Ketepatan kebijakan mengacu pada kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya. Secara umum, dampak positif dari program penurunan stunting sudah terlihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asumsi yang mendasari kebijakan ini cukup kuat dan relevan dengan kondisi di Kabupaten Mura Tara. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa intervensi gizi yang tepat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat mengurangi angka stunting secara signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah membawa dampak positif yang nyata.

Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara telah memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kesehatan ibu hamil meningkat berkat program penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, edukasi tentang asupan gizi yang baik telah diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita. Kedua, kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan anak telah menunjukkan hasil yang baik. Pemantauan rutin dan pemberian suplemen gizi secara teratur telah berkontribusi pada pencegahan stunting. Meskipun masih ada tantangan, seperti kurangnya pelatihan untuk petugas, kebijakan ini telah membentuk kerangka kerja yang efektif untuk menangani stunting di Kabupaten Mura Tara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mura Tara belum sepenuhnya berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Angka stunting meningkat naik 12,9 % pada Tahun 2024 menjadi 33,1% naik dari Tahun 2023 yaitu 20,2%, menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi berdasarkan lima kriteria menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam komunikasi antara petugas dan masyarakat, sudah terpenuhi kecukupan petugas namun terkendala karena kurang kepesertaan masyarakat mengikuti program – program yang di buat dalam melakukan penanganan stunting seperti kurang ikut serta masyarakat mengikuti posyandu rutin dan kurangnya kepesertaan masyarakat mengikuti penyuluhan terkait pencegahan stunting. Meskipun ada dampak positif, tantangan seperti kurangnya pelatihan petugas dan rendahnya partisipasi masyarakat perlu diatasi. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan komunikasi, memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan tujuan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah berpartisipasi, pemerintah setempat yang telah memberikan izin dan dukungan, serta seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti yang telah bekerja sama dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- ACC/SCN. (2000). *The world nutrition situation throughout the life cycle*. Geneva: World Health Organization (WHO).
- Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023.
- Chairunnisa, E., Kusumastuti, A.C., & Panunggal, B. (2018). *Asupan Vitamin D, Kalsium dan Fosfor pada Anak Stunting dan Tidak Stunting Usia 12-24 Bulan di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dewi, Devillya Puspita. (2018). Substitusi Tepung Daun Kelor (*Moringa Oleifera* L.) pada Cookies Terhadap Sifat Fisik, Sifat Organoleptik, Kadar Proksimat, dan Kadar Fe. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, 1(2): 104-112
- Dianti, R., Simanjuntak, B.Y., W, T.W. (2023). Formulasi Nugget Ikan Gaguk (*Arius Thalassinus*) dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa Oleifera*). *Jurnal Media Gizi Indonesia*, 18(2): 157-163. <https://doi.org/10.20473/mgi.v18i2.157-163>
- Fahliani, N., & Septiani. (2020). Pengaruh Substitusi Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lam.) Terhadap Sifat Organoleptik dan Kadar Kalsium *Snack Bar*. *Jurnal Gizi dan Pangan Soedirman*, 4(2): 216-228. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jgps>
- Firdanti E., et al. (2021). Permasalahan Stunting pada Anak di Kabupaten yang Ada di Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*, hlm, 126-133. <https://ojs.stikesindramayu.ac.id/index.php/JKIH/article/view/333>
- Hardiansyah, M., & Supriasa, I.D.N. (2016). *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Heluq, D.Z., & Mundiastuti, L. (2018). Daya Terima dan Zat Gizi *Pancake* Substitusi Kacang Merah (*Phaseolus Vulgaris* L) dan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) sebagai Alternatif Jajanan Anak Sekolah. *Jurnal Media Gizi Indonesia*, 13(2): 133-140. <https://doi.org/10.20473/mg.v13i2.133-140>
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2018a). Buletin stunting. Kementerian Kesehatan RI.
- Laporan TPPS Provinsi Sumatera Selatan 2024.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications. (Original work published 2014). (Trans. Tjetjep Rohindi Rohidi). UI Press.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Revised ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Suharno. (2013). Dasar-dasar kebijakan publik: Kajian proses dan analisis kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Wahyuningsih S, dkk (2025) di akses pada 30 Juni 2025
<https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/764/554>

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus). Yogyakarta: CAPS.